

## Pemerintah Diminta Evaluasi Kerjasama Soal Ketenagakerjaan dengan Malaysia

JAKARTA (IM) - Pemerintah Indonesia diminta mengevaluasi kembali kesepakatan hubungan kerja sama terkait ketenagakerjaan dengan Malaysia. Desakan itu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Keadilan dengan Malaysia, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes keputusan Mahkamah Malaysia membebaskan Ambika MA Shan, majikan dari tenaga kerja Indonesia (TKI) Adelina Lisao yang tewas di Malaysia.

"Kita perlu mengevaluasi hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Malaysia," ujar Anis kepada wartawan, Senin (27/6).

Menurut Anis, kasus kematian Adelina yang dianiaya majikannya di Malaysia dan keputusan bebas untuk pelaku oleh Mahkamah Malaysia telah melukai hati bangsa Indonesia. Apalagi, lanjut Anis, Pemerintah Indonesia baru saja menandatangani nota kesepakatan bersama Malaysia terkait perlindungan pekerja migran.

"Justru ini sangat melukai bangsa Indonesia karena kita baru saja menandatangani MoU baru dengan Malaysia, dengan kesepakatan-kesepakatan baru terkait dengan perlindungan PRT kita di sana," ungkap Anis.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Adelina menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia. Sebab, sejumlah bukti-bukti yang dilampirkan dan temuan dalam hasil gelar perkara sudah cukup kuat untuk merjerat Ambika MA Shan dalam kasus tewasnya Adelina.

"Sehingga kami datang untuk melakukan protes dan kecewa pada Malaysia yang memutuskan bebas pada majikan Adelina," kata Anis.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Persekutuan Malaysia -setara Mahkamah Agung- pada Kamis (23/6)

mengesahkan pembebasan majikan Adelina Lisao, asisten rumah tangga (ART) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018.

Majelis hakim yang beranggotakan Vernon Ong Lam Kiat, Harmindar Singh Dhaliwal, dan Rhodzariah Bujang menolak permohonan jaks penuntut umum untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi.

Dalam putusannya, Hakim Vernon, yang mengetuai majelis hakim, mengatakan Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan putusan dengan benar dalam membebaskan majikan Adelina, Ambika MA Shan.

Hakim Vernon mengatakan jaks penuntut umum harus memberikan alasan mengapa mengajukan permohonan Discharge Not Amounting To Acquittal (DNAA). Menurut Vernon, DNAA hanya boleh diberikan jika ada alasan valid yang diberikan pihak jaks.

"Malah berdasarkan catatan banding, tiada alasan diberikan pihak pendakwaan (di Pengadilan Tinggi)," kata Hakim Vernon sebagaimana dilaporkan kantor berita Bernama.

DNAA berarti terdakwa dibebaskan dari dakwaan, tetapi dapat dituntut lagi di kemudian hari. Sebaliknya, putusan Mahkamah Persekutuan ini membuat Ambika bebas murni dan tidak bisa didakwa pidana atas kematian Adelina.

Adelina Lisao adalah TKI asal Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, yang meninggal di Malaysia pada 11 Februari 2018. Adelina (21) dilaporkan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Penang, Malaysia.

Sebelum meninggal dia dilaporkan tidur bersama anjing selama sebuah. Saat hendak dievakuasi tim penyelamat, dia tampak ketakutan. Di tubuhnya terdapat nanah bekas luka bakar. ● me

## Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan 11 Calon Hakim Agung Selama 3 Hari

JAKARTA (IM) - Komisi III DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (MA).

Uji kelayakan dimulai sejak 27-29 Juni 2022 dan dimulai dengan pengambilan nomor urut peserta dan pembuatan makalah.

"Satu, pelaksanaan uji kelayakan fit and proper test pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2022 dan jadwal nomor urut uji kelayakan disusun setelah Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung memperoleh nomor urut peserta seleksi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh dalam Rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Pangeran menjelaskan, calon hakim membuat makalah dengan ketentuan dibuat paling banyak 5 halaman, menggunakan kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan didasarkan pada tema yang disediakan oleh Komisi III DPR RI dan diundi. Adapun jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan paling

lama 1 jam. Makalah dapat dibuat dengan cara diketik dengan komputer atau laptop atau dapat ditulis dengan tangan.

Pangeran menambahkan, alokasi waktu uji kelayakan fit and proper test masing-masing calon hakim agung paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah.

Setelah memanggil satu per satu CHA dan Calon Hakim Ad hoc Tipikor pada MA, para calon dipersilakan membuat makalah dalam waktu 1 jam di Ruang Rapat Komisi III DPR secara terbuka.

"Para calon hakim agung dan calon hakim atau Tipikor pada Mahkamah Agung telah mengambil nomor urut dan judul makalah, maka sudah saatnya para calon untuk mulai membuat makalah selama 1 jam dari sekarang," ujarnya.

"Setelah selesai pembuatan makalah maka Sekretariat Komisi III akan mengumpulkan makalah dari para calon hakim agung uji kelayakan akan dilaksanakan dari nomor urut 1 dan seterusnya mulai hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dan Rabu tanggal 29 Juni 2022," tandasnya. ● han

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. DWI PERKASA RAYA berkedudukan di Jakarta Selatan, tertanggal 23 Juni 2022 No. 65, yang aslinya dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu :

membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022 dan menunjuk Tuan TJIA JONG SIN, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor likuidatur : Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Ruko Permata Kota Blok I No. 10 - 11, Jakarta Utara.

Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidatur berikut bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 28 Juni 2022

Likuidatur

PT. DWI PERKASA RAYA

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. WAHANA SEJAHTERA LESTARI berkedudukan di Jakarta Pusat, tertanggal 23 Juni 2022 No. 64, yang aslinya dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu :

membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022 dan menunjuk Tuan TJIA JONG SIN, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor likuidatur : Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Ruko Permata Kota Blok I No. 10 - 11, Jakarta Utara.

Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidatur berikut bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 28 Juni 2022

Likuidatur

PT. WAHANA SEJAHTERA LESTARI

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PRIMA WAHANA PERKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, tertanggal 23 Juni 2022 No. 62, yang aslinya dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu :

membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022 dan menunjuk Tuan TJIA JONG SIN, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor likuidatur : Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Ruko Permata Kota Blok I No. 10 - 11, Jakarta Utara.

Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidatur berikut bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 28 Juni 2022

Likuidatur

PT. PRIMA WAHANA PERKASA

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PRIMA WAHANA NUSANTARA berkedudukan di Jakarta Pusat, tertanggal 23 Juni 2022 No. 63, yang aslinya dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu :

membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022 dan menunjuk Tuan TJIA JONG SIN, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor likuidatur : Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Ruko Permata Kota Blok I No. 10 - 11, Jakarta Utara.

Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidatur berikut bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 28 Juni 2022

Likuidatur

PT. PRIMA WAHANA NUSANTARA

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## RAKER BANGGAR DPR DENGAN PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) berdiskusi dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah (kiri) sebelum memulai Rapat Kerja antara Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Bank Indonesia dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Rapat tersebut beragendakan penyampaian dan pengesahan laporan panja-panja Banggar DPR dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RABPN TA 2023 dan RKP tahun 2023.

# Capres 2024, Nasdem Tunggu Respons Anies Baswedan, Ganjar dan Andika

Partai Nasdem terus melakukan komunikasi dengan Parpol lain untuk menyamakan pandangan dan pikiran dalam menghadapi Pemilu 2024.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan, partainya memang belum menawarkan soal tiga nama yang masuk bursa calon presiden (capres) dari hasil Rapat

Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem.

Menurut Ali, tiga nama yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa akan ditawarkan ke partai-partai lain usai ketiganya mem-

berikan respons.

"Kita tentunya belum menawarkan. Karena kita akan menanyakan kepada ketiganya (Anies-Ganjar-Andika)," kata Ali saat dihubungi, Senin (27/6).

Ali melanjutkan, Nasdem lebih memilih untuk menunggu respons ketiga calon tersebut terkait hasil Rakernas, sebelum menawarkan ke partai politik lain.

Pasalnya, Nasdem akan kebingungan jika salah satu di antara mereka justru menolak

hasil Rakernas.

"Kita menawarkan kepada parpol, tiba-tiba salah satu dari mereka menolak bagaimana?" ucap Ali.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu menjelaskan, hingga kini komunikasi dengan partai politik lain terus dilakukan partainya. Menurut dia, komunikasi itu dilakukan untuk menyamakan pandangan, pikiran menghadapi Pemilu 2024. Lanjut Ali, jika telah ditemukan kesamaan, Nasdem baru akan mengundang tiga bakal calon presiden usungan Rakernas.

"Setelah ada kesamaan pandangan, pikiran dengan partai-partai koalisi kita akan mengundang bakal capres tersebut. Mau enggak calonkan partai Nasdem dan koalisinya? Kalau tidak kan, bertepuk sebelah tangan nantinya," tutur Ali.

Sebelumnya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jen-

deral Andika Perkasa menjadi nama yang diusulkan Partai Nasdem menjadi kandidat capres Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin tim Steering Committee Rakernas Nasdem telah merenungkan ketiga nama capres itu dengan serius sebelum menyerahkan nama-nama itu kepadanya.

"Rekomendasi yang ditunjukkan kepada saya, dengan amanah rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal capres RI yang akan diusung Partai Nasdem pada Pemilu 2024 yang akan datang dari tiga nama. Tiga nama ini adalah pilihan saudara-saudara," kata Surya Paloh.

"Saya akan bacakan, penetapan rekomendasi bakal capres pada Pemilu 2024. Pertama, Anies Rasyid Baswedan, kedua Muhammad Andika Perkasa, ketiga Ganjar Pranowo," kata Surya. ● han

## Setelah 9 Kali Gagal Tes Masuk TNI, Anak Petani Ini Akhirnya Tembus Akmil

JAKARTA (IM) - Perjalanan Fadlul Rohman untuk diterima jadi tentara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meski sudah Sembilan kali gagal tes, anak petani dari Banyuwangi, pantang menyerah. Kerja kerasnya pun akhirnya berbuah manis, ia diterima masuk Akademi Milioter (Akmil).

Fadlul sembilan kali termasuk tes di bintang AD dan Akademi Angkatan Udara (AUU) namun gagal.

"Alhamdulillah saya sudah sangat bahagia, persaudaan 10 kali mendaftar," ujar Fadlul dalam channel TNI AD, dilan-

sir Senin (28/6).

Sejak kecil kata Fadlul, dirinya memiliki cita-cita menjadi Prajurit TNI. Setelah lulus dari MAN 2 Banyuwangi pada 2016, dia lalu mencoba masuk Akmil.

"Ingin kuliah, tapi karena orang tua tidak ada biaya dan saya bingung juga cara mendaftar SBM (SBMPTN), akhirnya saya mendaftar bintang TNI AD," sambung Fadlul.

Sambil mengisi waktu luang, Fadlul akhirnya bekerja sebagai asisten apoteker di salah satu apotek di Banyuwangi sambil menunggu pendaftaran Akmil tahun selanjutnya.

Dia pun mempelajari

bagaimana cara bisa lolos seleksi TNI setelah berbagai kegagalan. Selain mengasah kemampuan akademis, dia juga terus menempa fisiknya agar bisa lolos.

Fadlul lalu mendaftar Akmil pada tahun 2019 lewat seleksi di Kodam Jaya. Pada tingkat sub panda, dirinya menempati rankinging 1. Tes berlanjut hingga tingkat panda. Perjuangan keras dan doa selama bertahun-tahun akhirnya membawa dia ke Lembah Tidar. "Di tingkat panda Alhamdulillah saya juga rankinging 1 dan akhirnya lulus," tandasnya. ● han

## RUU KIA Mewajibkan Tempat Kerja Siapkan Daycare

JAKARTA (IM) - Anggota Badan Legislasi DPR Luluk Nur Hamidah menyebutkan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mewajibkan fasilitas umum dan tempat kerja menyiapkan tempat penitipan anak atau daycare hingga ruang laktasi.

"Fasilitas sarana dan prasana (sarpras) yang harus disediakan seperti tersedianya daycare, ruang bermain, dan ruang laktasi yang wajib dipenuhi oleh pihak manapun, khususnya pengelola sarpras umum ataupun di tempat kerja," kata Luluk dalam siaran pers, Senin (27/6).

Kewajiban menyediakan daycare, ruang bermain, hingga ruang laktasi tertuang dalam Pasal 22 dan 23 draf RUU KIA. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa penyedia atau pengelola fasilitas dan sarana prasarana umum harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi bu-

dan anak.

Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana prasarana umum bagi ibu dan anak tersebut meliputi dukungan fasilitas di tempat kerja, tempat umum, dan alat transportasi umum.

Dukungan fasilitas yang dimaksud ada dalam Pasal 22 Ayat (3) RUU KIA berupa penyediaan ruang laktasi, penyediaan ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, hingga tempat bermain anak. Lalu, Pasal 23 RUU KIA mengatur pemberian pembinaan dan/atau sanksi administratif bagi penyedia atau pengelola fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan di atas.

"Daycare di tempat kerja tidak dapat kita anggap perkara sederhana jika paham manfaatnya. Daycare ini sekaligus menjamin ibu atau orangtua tetap dapat bekerja secara produktif, tenang, nyaman, bahkan memberikan ASI lebih dari 6 bulan," kata Luluk. ● me

## Gerindra Yakin akan Dikunjungi Puan Saat akan Menjajaki Kerjasama Politik

JAKARTA (IM) - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yakin partainya bakal dikunjungi Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang ditugaskan melakukan penjajakan kerja sama dengan partai politik lainnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Akan tetapi, Dasco mengaku belum mengetahui kapan Puan dan jajaran PDI-P

akan menemui para pengurus Gerindra.

"Saya belum tahu apakah ada komunikasi atau belum komunikasi, tetapi rasa-rasanya sih kalau kemudian akan melakukan kunjungan-kunjungan pasti Gerindra juga dikunjungi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/6).

Dasco pun menilai, tugas yang diberikan oleh PDI-P kepada Puan untuk bertemu dengan partai-partai politik merupakan bagian dari dinamika politik. Pertemuan antarpolitical politik untuk menjajaki kerja sama dan mencari kesepahaman adalah hal yang biasa.

Diberitakan sebelumnya, Puan mengaku mendapat tugas dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjajaki kerja sama dengan partai politik lain menghadapi Pilpres 2024. ● han